

# Visionist

Vol. 9, Nomor 2–September 2020

ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MEMETAKAN (MAPPING) KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK BADAN YANG POTENSIAL DI KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2019 ..... <i>Agah Rahadian, Tina Miniawati Barusman dan Haninun</i>	1-15
ANALISIS PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERBASIS KORPORASI ..... <i>Indriati Agustina Gultom, Ayu Kartika Puspa, Yanuarius Yanu Dharmawan, Achmad Subing</i>	16-20
PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. AGRO MULTIGUNA SEJATI ..... <i>Iskandar Muda Pohan, Andala Rama Putra Barusman dan M Oktaviannur</i>	21-25
PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BRITAMA BRI CABANG TELUK BETUNG MELALUI KEPUASAN NASABAH ..... <i>Travel Valeri Mercuri, Andala Rama Putra Barusman dan M Oktaviannur</i>	26-32
PENGARUH <i>JOB ROTATION</i> (ROTASI PEKERJAAN), <i>JOB ASSIGNMENT</i> (PENUGASAN PEKERJAAN) DAN <i>MENTORING</i> TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN TALENTA KARYAWAN PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ..... <i>Wendi Purwanto, Tina Miniawati Barusman dan Habiburrahman</i>	33-39
PENGARUH MOTIVASI DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG ..... <i>Wiwi Nurhayati, Iskandar Ali Alam dan M Oktaviannur</i>	40-45
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG ..... <i>Yana Marisa, Defrizal dan Hendri Dunan</i>	46-51
ANALISIS DAMPAK INDUSTRI STOCKPILE BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN DAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT ..... <i>Zainal Muslim, Helina Helmy</i>	52-59

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 – 59	Bandar Lampung Sept 2020	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

*Jurnal Manajemen*

# **Visionist**

Volume 9, Nomor 2 – September 2020

## **DEWAN PENYUNTING**

### **Penyunting Ahli**

Sударsono (Ketua)  
Sri Utami Kuntjoro  
Sinung Hendratno  
Agus Wahyudi  
Abdul Basit

### **Penyunting Pelaksana**

Budhi Waskito  
Ardansyah  
Eka Kusmayadi  
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung  
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261  
Email: [visionist@ubl.ac.id](mailto:visionist@ubl.ac.id)

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)  
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

# Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung

Yana Marisa<sup>1</sup>, Defrizal<sup>2</sup>, Hendri Dunan<sup>3</sup>

Program Studi Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden yang merupakan pengelola keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung. Penentuan sampel melalui purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 40 responden. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi masing-masing secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung*

**Kata Kunci:** *Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*

## Pendahuluan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menjadi BLU, diharapkan instansi tersebut dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik

Dalam hal menyusun laporan keuangan, BLU wajib menerapkan akuntansi akrual secara penuh sejak ditetapkannya sebagai badan layanan umum. BLU berkewajiban menyusun laporan keuangan dengan 2 (dua) versi yaitu berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan BLU, dimana pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “BLU menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia” serta versi berdasarkan SAP yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (4) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan BLU bahwa dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan PMK 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan SAP Berbasis Akrual No 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. PSAP nomor 13 ini merupakan penyempurnaan dari PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual yang sebelumnya belum mengatur secara detail bagaimana BLU harus menyajikan laporan keuangannya. Dengan adanya PSAP nomor 13 ini, maka satuan kerja pemerintah yang berbadan layanan umum sejak diterbitkannya PMK 217/PMK.05/2015 ini tidak lagi menyusun laporan

keuangan dengan 2 (dua) versi, namun hanya menyusun 1 (versi) laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

Meskipun telah diterbitkannya peraturan mendetail mengenai penyusunan laporan keuangan BLU, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunannya yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan BLU tersebut. Dari hasil pengamatan, dugaan sementara yang peneliti dapat yaitu masih ditemukan BLU di Provinsi Lampung yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan (dianggap kurang relevan), data yang disajikan masih belum akurat dimana terdapat jurnal tidak lazim (dianggap kurang andal), ketidakmampuan BLU dalam menyajikan pos-pos laporan keuangan dengan tepat, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dianggap kurang lengkap dan informative serta masih terdapat istilah-istilah yang sulit dipahami.

### *Tinjauan Pustaka Dan Hipotesis*

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan padasasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah dengan teori *stewardship*. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja pimpinan/kepala instansi/kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPR/DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBN/APBD serta opini Laporan Keuangan yang diperoleh. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### *Kompetensi Sumber Daya Manusia*

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu. Sukaningrum (2011), Defrizal (2017), menemukan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya, sedangkan Xu et al. (2003) menyatakan bahwa sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis dalam menentukan kualitas informasi akuntansi dalam menentukan kualitas informasi akuntansi.

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### *Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah*

Keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya tidak luput dari peranan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai unit pengendali. Unsur-unsur yang menjadi acuan SPIP dalam memerankan tugasnya yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian intern yang diprosikan dengan integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijakan dan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Sukmaningrum, 2011). Sedangkan penelitian Anggraeni (2014) menunjukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah dan efektifitas SPIP menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

### *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan*

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan aturan dasar yang harus dipahami sumber daya manusia ketika menjalankan tupoksinya agar output yang dihasilkan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan dasar instansi milik pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Nordiawan (2006), menemukan bahwa penerapan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan informasi yang berguna.

H3: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### *Pemanfaatan teknologi informasi*

Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat diandalkan. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Anggraini (2014) menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### *Kinerja Keuangan*

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003), Dunan & Liyana (2014), pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

### **Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki atau memotret keadaan, kondisi, atau hal lain tanpa mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian yang kemudian hasilnya dipaparkan dalam sebuah laporan penelitian (Arikunto, 2001). Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang tupoksinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada 5 (lima) badan layanan umum di Provinsi Lampung meliputi: Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, RS Bhayangkara Bandar Lampung dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dengan kriteria tertentu (Notoatmodjo 2010 dalam Sari 2016). Sampel yang diambil adalah pegawai pada BLU Provinsi Lampung yang tanggungjawab dan tugas pokok fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dengan total sampel yang didapat sebanyak 40 orang.

### *Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis*

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan system pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung adalah regresi linier berganda sedangkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji t dan Uji F simultan

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### *Uji T*

**Tabel. 1 Hasil Uji T**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.938	2.923		2.715	.010
	SDM	.190	.051	.314	3.731	.001
	SPIP	.099	.047	.159	2.097	.043
	SAP	.090	.041	.197	2.195	.035
	IT	.448	.091	.480	4.918	.000

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung yang diperoleh pada table diatas dengan tariff signifikansi 0,05 dan rumus t tabel  $df = n - k$  dimana k = banyaknya variabel,  $df = 40 - 5 = 35$  pada probabilitas signifikansi 0,05, diperoleh harga kritis sebesar 1.690. Dari data yang diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Berdasarkan hasil Uji t dapat nilai t hitung =3,731. Apabila dibandingkan dengan t table pada tariff signifikansi yaitu 1,690, maka t hitung =3,731 > t table = 1,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat

- pengaruh positif secara signifikan variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai t hasil perhitungan bernilai positif.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)  
Berdasarkan hasil Uji t dapat nilai t hitung =2,097. Apabila dibandingkan dengan t table pada tariff signifikansi yaitu 1,690, maka t hitung =2,097 > t table = 1,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai t hasil perhitungan bernilai positif.
  3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)  
Berdasarkan hasil Uji t dapat nilai t hitung =2,195. Apabila dibandingkan dengan t table pada tariff signifikansi yaitu 1,690, maka t hitung =2,195 > t table = 1,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai t hasil perhitungan bernilai positif.
  4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)  
Berdasarkan hasil Uji t dapat nilai t hitung =4,918. Apabila dibandingkan dengan t table pada tariff signifikansi yaitu 1,690, maka t hitung =4,918 > t table = 1,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai t hasil perhitungan bernilai positif.

*Uji F*

**Tabel 2. Hasil Uji F  
ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	350.190	4	87.548	45.456	.000 <sup>a</sup>
Residual	67.410	35	1.926		
Total	417.600	39			

Nilai F hitung adalah 45.456 dan nilai signifikansi (sig) 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H<sub>0</sub> tidak didukung (H<sub>1</sub> didukung) karena nilai F hitung > F tabel, rumus mencari F tabel adalah (n-k) dimana k = jumlah variable independent yaitu 4 dan jumlah responden 40 maka menghasilkan angka (40-4=36) angka ini menjadi acuan untuk mengetahui nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel senilai 2.63. karena nilai F hitung 45.456 lebih besar dari nilai F tabel 2.63 sehingga dapat disimpulkan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima atau bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

*Pembahasan*

1. Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan/ skill, dan perilaku/sikap. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan Anggraini (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Delanno & Deviani (2013), yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Indikator untuk mengukur variable penerapan system pengendalian intern pemerintah didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2016) dan Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Yudianta & Erawati (2012) dengan hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Zuliarti (2012), pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dimana apabila standar akuntansi pemerintah telah diterapkan dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik pula. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Nurhayati (2013) yang menunjukkan bahwa dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka laporan keuangan akan lebih berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik. Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dan Indriasih (2014) juga memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

4. Variabel pemanfaatan teknologi dilihat dari penggunaan computer, software, jaringan internet, database dan informasi, serta pemeliharaan teknologi informasi yang digunakan. Berdasarkan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Zuliarti (2012) dengan hasil, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Kemudian, Yosefrinaldi (2013), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Penelitian Delanno & Deviani (2013) juga menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Kesimpulan Dan Implikasi

### *Kesimpulan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada instansi pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung

### *Implikasi*

1. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pengelola keuangan pada Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan dengan materi yang mudah dan pengelola keuangan perlu meningkatkan manajemen waktu penyelesaian laporan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan, Hal ini dikarenakan masih ditemukannya responden yang memilih ragu-ragu dalam mengikuti pelatihan dan rata-rata responden setuju menyatakan kekurangan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga membutuhkan lembur untuk menyelesaikannya.
2. Nilai responden terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah yang terkecil dan hasil jawaban responden menggambarkan pengendalian intern Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung masih kurang efektif sehingga pemantauan pengendalian intern perlu ditingkatkan.
3. Masih terlihat beberapa responden yang masih kurang memahami standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga penerapan basis akrual melalui standar akuntansi pemerintah pada Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung ini perlu ditingkatkan agar kualitas laporan keuangan meningkat.
4. Dalam pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung, masih ada responden yang menjawab ragu-ragu dalam menggunakan jaringan internet sebagai penghubung pengiriman informasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan melalui jaringan internet sehingga kualitas laporan keuangan dapat memenuhi syarat normative mengingat rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah saat ini dominan dilakukan secara elektronik.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, D.T. dan Riduawan, A. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.3 No. 3 (2014).
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunan, Hendri & Liyana. 2014. Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tarahan Tahun 2007-2011. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol, 5, No; 1.

Defriani. 2017. Pelatihan Perencanaan Strategis Dalam Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Marketing Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Se Provinsi Lampung. Pengabdian Kepada Masyarakat

Jonas, G. J. dan Blanchet. J. 2000, Assessing Quality of Financial Reporting. Accounting Horizons, September 14,3; Pg.353.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi

Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan BLU

Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan SAP Berbasis Akrua No 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Sari, Desi Puspita. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unila, Bandar Lampung.

Sudarmanto, 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi. Pustaka pelajar. Yogyakarta

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung

Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2011. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Jurnal Akuntansi Undip. Semarang.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara